

Tabel 11. PENGKODEAN HASIL WAWANCARA

Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil pengganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan jaman.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang KPE mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain : Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan utama diberlakukannya KPE adalah perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk KPE dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2	Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi KPE selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi dengan BKN terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi KPE dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN terkait prosedur administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008. Selain itu BKD selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di Jakarta.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selaku <i>leading sector</i> dalam implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.
3	PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran yang kami sebarkan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh PNS dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> BKN menunjuk pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam data PNS, dimana PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur atau persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan antara lain membawa Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.

		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE diharuskan mengikuti prosedur atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP tersebut.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan melengkapi prosedur- prosedur seperti harus mengumpulkan SK pangkat terakhir dan foto copy KTP yang bersangkutan.
4	Kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah menandatangani <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini, ditahun 2014 masih ada ± 1500 PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini yang sedang kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80% dari ± 11.000 PNS yang ada di Kota Bandar Lampung sudah sekitar ± 9000 PNS yang sudah memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib KPE ± 1500 PNS belum jelas untuk memiliki KPE tahun ini.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang cakupnya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan antrian panjang dalam pemfotoan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE sejumlah ± 1500 PNS, disamping itu BKN belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi PNS kota Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE Kota Bandar Lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji PNS.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi BKD antara lain seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna KPE terutama PNS Guru yang tertinggal informasi KPE.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi dalam implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui peraturan

			Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya mendelegasikan implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai <i>leading sector</i> KPE dengan mendatangi MoU, kalau kendala mungkin ada pada daerah masing - masing.
5	Frekwensi Sosialisasi KPE kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka Loker Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, yang terbaru adalah mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya kami dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan yang notabene memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Gedung Sumergow.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya sosialisasi yang telah kami lakukan terkait implementasi KPE antara lain : mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • ± 3 kali BKD melayangkan surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi BKD daerah terkait agar segera melakukan sosialisasi, BKN hanya bersifat berkoordinasi dengan BKD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia.
6	Peranan BKN dalam proses Implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan dalam memberikan arahan– arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan– arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan – arahan tentang hal – hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan– arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi KPE. BKN juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak BKN, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam hal ini Foto PNS dan sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE PNS.
7	Proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak BKN menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3 BKN menyerahkan sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada

			Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak BKN tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke BKD Kota Bandar Lampung untuk melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE berlangsung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Ya tentu saja.
8	Proses Kerjasama BKD Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-3.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian KPE yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk menfungsikan Layanan Perbankan KPE, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • KPE pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15

			<p>Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS tanpa adanya layanan perbankan dalam KPE.</p>
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan pihak ke-3.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan KPE, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).
9	Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Kerjasama dengan pihak ke-3.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/II.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS bukan justru menimbulkan masalah baru.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan KPE.

		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan Perbankan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari atasan dalam hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak ke-3.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.
10	Frekwensi distribusi KPE yang sudah jadi oleh BKN.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tiga Kali.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga kali di distribusikan dari BKN
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya sudah 3 kali dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.
11	Fungsi KPE sudah sesuai dengan peruntukannya.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah sesuai, kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peraturan Kepada BKN Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS, KARPEG, KARSU.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai walaupun Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> KPE sebagai pengganti kartu identitas PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak fungsi dari KPE yang belum maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung masih optimis untuk memfungsikanya.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian besar belum termanfaatkan

			dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja DKI Jakarta.
12	Tujuan KPE sudah tercapai.	1. Drs. Muhammad Umar	• Sebagai Konversi dari Karpeg.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	• Walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai Konversi dari Karpeg sudah berjalan.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	• Bisa dikatakan demikian.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	• Sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi Layanan Perbankan dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.
		5. Muzanni Ali, S.E.	• Sepertinya masih belum tercapai.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Sudah, walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Sumber Daya yang ada sudah mendukung Kebijakan KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	• Sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	• Saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	• Tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	• Sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE, terkait dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer).
		5. Muzanni Ali, S.E.	• Sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD baik itu manusianya maupun teknologi-nya sudah cukup memadai.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Iya sudah.

2	Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah memahami Tuposinya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang ada di BKD sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan S2.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah di dukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan KPE. BKN dalam proses implementasi KPE menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data PNS seluruh Indonesia.
3	Proses Alokasi Sumber Dana dalam kebijakan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi KPE dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnya
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota Bandar Lampung yang dibebankan pada Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara sudah meralokasikan dana dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE di seluruh Indonesia.
4	Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE pada BKD Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 & 2010 mensosialisasikan KPE keseluruh Kepala SKPD.

		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan melalui Loker Pelayanan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di provinsi, kabupaten ataupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
5	Cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.
6	Media yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Loker Pelayanan Informasi KPE.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Loker Pelayanan Informasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran,

	(KPE).		<ul style="list-style-type: none"> • Loket Pelayanan Informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian, selanjutnya melalui surat resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung terkait jadwal pemfotoan dan melalui Loket Pelayanan di Bidang Kepegawaian.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat dan Loket Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE kepada PNS.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-Indonesia dilaksanakan secara bertahap.
7	Hambatan dan kendala Teknis yang di hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman data PNS.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang professional dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari PNS yang melakukan pemfotoan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan BKN dalam implementasi KPE di kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo sudah memenuhi itu.
8	Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman data PNS. Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data PNS oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan undangan kepada PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN menunjuk pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti,	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk BKN yaitu PT.

		M.M.	Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini teknologi cukup baik.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemfotografan KPE, kesiapan teknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan BKN yaitu PT. Sucofindo, BKD hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan pemfotografan bagi PNS.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Semua proses pemfotografan dilakukan oleh PT. Sucofindo.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Iya tentu saja.
9	PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami sediakan pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bisa memanfaatkannya.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah membuka Loket Pelayanan KPE yang bisa diakses pada jam-jam kerja. PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bias memanfaatkannya.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya loket pelayanan kepegawaian dapat dengan mudah memberikan informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak tahun 2011 BKD membuka loket khusus untuk memberikan informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS bias dengan mudah memperoleh informasi.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD, Staff BKD akan memberikan informasi yang dibutuhkan.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Iya, melalui Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian.
10	Pelayanan informasi di BKD tentang KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada Loket Pelayanan Informasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD membuka Loket Pelayanan Informasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyediakan Loket Pelayanan Informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyiapkan loket pelayanan informasi tentang KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyediakan loket pelayanan informasi KPE.
11	Pelayanan Sudah dimanfaatkan dengan Baik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loket Pelayanan Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotografan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.

		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket Pelayanan KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal kapan jadwal pemfotoan KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE ke BKD.
12	Political Will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Bandar Lampung harus mendukung dan menyukseskan agenda kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara salah satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan terus mengupayakan agar KPE tidak hanya berfungsi sebagai Konversi dari Kartu Pegawai yang berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, tetapi juga bisa digunakan dalam meningkatkan layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan atau pembayaran gaji PNS. Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan mendukung pihak perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk bisa melaksanakan Layanan Perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji PNS dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya hari ini adalah, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan dengan seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan Layanan Perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji bukan justru menimbulkan masalah baru.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai Kartu Identitas PNS pengganti KARPEG.

		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi Bapak Walikota, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (Konversi) Kartu Pegawai ke KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS kota Bandar Lampung.
13	Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung, kita akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal teknis pembayaran gaji PNS, Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Koordinasi juga harus dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis pelaksanaannya dan yang terakhir adalah kembali melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota Bandar Lampung memiliki KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar Lampung segera melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Segera menyelesaikan proses pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki KPE.
14	Tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan BKN.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan bertukar pikiran dengan

			beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti Kota Metro terkait pelaksanaan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses pengambilan data bagi PNS yang belum memiliki KPE.
15	Responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Hampir seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data Pegawai.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses pemfotografan dihadiri banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti belum memiliki KPE selalu menanyakan jadwal pemfotografan KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya menyambut baik adanya KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE sebagai Kartu Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih sedikit bingung tentang fungsi dari KPE tersebut.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotografan KPE yang dihadiri banyak PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.

Fokus pada PNS penerima KPE

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Dukungan PNS terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Tentu saja, saya sebagai PNS Kota Bandar Lampung saya wajib dan mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sangat setuju dengan adanya KPE namun tidak turut mendukung pada implementasinya, karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Ya mendukung.
2	Usaha yang PNS lakukan guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi undangan untuk hadir dalam acara pemotretan KPE yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan membawa S.K pangkat terakhir dan foto copy KTP.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> --
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan foto Kartu Pegawai Elektronik di bagian Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan membawa foto copy SK pangkat terakhir.
3	Frekwensi KPE didistribusikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> KPE didistribusikan pada tahun 2010 dan saya langsung mendapatkan KPE berwarna kuning dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sudah satu kali itu pun sebelum saya menjadi PNS.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Satu kali.
4	Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> KPE pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Penganti Kartu Pegawai.
5	Apa saja fungsi dari KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas dari PNS, dikemudian hari akan dapat di jadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan untuk menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu Asuransi (ASKES). Media penyimpanan/Database informasi kepegawaian.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas PNS.
6	Tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Belum terasa manfaatnya.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Belum terlaksana.

	Elektronik dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian	3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pelaksanaan masih rendah.
7	Tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> KPE masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Belum tahu karena belum memiliki.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah di fungsikan secara maksimal.
8	Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Bagi teman-teman yang belum memiliki kartu KPE untuk segera melakukan pemotolan KPE.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan pendistribusian KPE keseluruhan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank yang ditunjuk untuk segera tercapainya fungsi dari KPE tersebut.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Kurang tahu.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Semenjak saya menjadi pegawai pada tahun 2011, saya belum merasakan adanya sosialisasi oleh BKD kota Bandar Lampung.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah.
2	Cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Melalui surat yang masuk ke SKPD masing-masing.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Dengan mengundang PNS kota Bandar Lampung untuk diberikan sosialisasi tentang KPE di Gedung Semergou.
3	Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Kurang tahu.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tempat sosialisasi yang terbatas.

4	Kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh implementor (BKD).	1. Sri Rohatinah	• Gedung Semergo dan Gedung Tapis Berseri.
		2. Rio Jayana Putra	• Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Gedung Semergo Kompleks Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009.
5	Pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik	1. Sri Rohatinah	• Ada di BKD kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	• Ada Loker Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang menyediakan informasi tentang KPE.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Ada.
6	Apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	• Saya pernah menemani teman saya yang KPE-nya terjadi kesalahan penulisan NIP dan mendatangi Loker Pelayanan KPE yang ada di BKD kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	• Iya beberapa teman saya telah menanyakan informasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ke BKD Kota Bandar Lampung.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Bagi PNS yang ingin mengetahui tentang KPE ataupun bila ada kesalahan/kerusakan/kehilangan KPE PNS di pemkot Bandar Lampung.
7	Responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai Negeri Sipil	1. Sri Rohatinah	• Staff di BKD bias menjelaskan permasalahan tentang KPE dan solusinya.
		2. Rio Jayana Putra	• Kurang tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Cukup responsive setiap pengaduan yang masuk langsung di tindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan/berwenang.

Tabel 12. Triangulasi Sumber Hasil Reduksi Data

Fokus Masalah		Triangulasi Sumber Data		
		Wawancara	Observasi	Dokumentasi
1.	Aspek Implementator (Badan Kepegawaian Daerah)	Pelaksanaan perekaman data pegawai dilakukan oleh Rekanan pihak-ke3 yaitu PT. Sucofindo. Badan Kepegawaian Daerah melakukan Sosialisasi kepada seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian serta mengirimkan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung untuk melakukan perekaman data PNS guna pembuatan KPE.	Pihak ke-3, yaitu PT. Sucofindo kurang memiliki persiapan yang cukup dalam proses perekaman data yaitu kurangnya Personil dan alat-alat dalam proses perekaman data yang menyebabkan antrian panjang PNS. Proses sosialisasi terhenti hanya pada Kepala SKPD yang menghadiri sosialisasi KPE, Kepala SKPD tidak melanjutkan sosialisasi kepada seluruh bawahannya, sehingga menyebabkan banyak PNS yang kurang memahami Fungsi KPE dan tidak menghadiri acara perekaman data PNS dikarenakan kurangnya informasi.	Diperoleh: 1. Daftar Komplain dari PNS yang tidak melakukan proses perekaman data PNS.
2.	Aspek Pegawai Negeri Sipil Penerima Manfaat KPE	Pegawai Negeri Sipil penerima manfaat Kartu Pegawai Elektronik berjumlah 11.480 PNS. Setelah dilakukan pendataan ulang terdapat sejumlah 1.200 PNS yang belum memiliki KPE. Jadwal perekaman data ulang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada bulan Agustus 2014.	Ada pengembangan data terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki KPE tetapi terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, dan Photo. PNS-PNS tersebut mendatakan dirinya ke Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan perekaman data ulang.	Diperoleh: 1. Daftar nama PNS yang belum memiliki KPE. 2. Daftar nama PNS yang terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, dan Photo.
3.	Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi	Penggunaan Sumber daya dilakukan secara efektif, misalnya saja dengan melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melakukan Koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Komunikasi juga berjalan dengan intensif antara PNS pengguna KPE dan BKD selaku pemberi layanan informasi melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian pada kantor BKD Kota.	Pelayanan Informasi KPE kepada PNS dilakukan setiap hari pada jam-jam kerja. BKD mendata semua komplain PNS, baik yang belum memiliki KPE, KPE hilang, kesalahan penulisan Nama, NIP PNS, dan Photo yang salah.	Tidak ada

Tabel 13 Tabulasi Analisis Data

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Implementator (Badan Kepegawaian Daerah)

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Drs. Muhammad Umar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung	<p>Dimensi pada Fokus pada Aspek Implementator</p> <p>a. Pengetahuan Implementor Tingkat pemahaman Implementor terhadap Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 bisa dikatakan sudah cukup baik.</p> <p>b. Kemampuan implementor dalam melaksanakan prosedur administratif Upaya untuk meningkatkan kemampuan implementor dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dengan melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>c. Ketepatan proses Sosialisasi, dan kerja sama dengan pihak perbankan dalam Implementasi KPE Sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Dimensi kesesuaian prosedur administratif dan ketepatan waktu pelaksanaan akan dibedah dengan menggunakan konsep Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab aparat kepada publik (Widodo:147). Secara spesifik, analisis akan menggunakan akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang menekankan pada metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output.</p>	<p>Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian:</p> <p>1. Secara administratif, pelaksanaan program konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik sudah berjalan baik.</p>
2.	SITI SUPIAH, S.H., M.H. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
3.	RINING SRI HASTUTI, M.M. Kepala Bidang Kesejahteraan, Data Dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota B.Lampung			
4.	FARIANA, S.IP., M.IP. Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
5.	Muzanni Ali, S.E. Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
6.	Drs. Rahmat Sutomo Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara			

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Pegawai Negeri Sipil Penerima Manfaat KPE

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Sri Rohatinah Pegguna Layanan KPE Golongan II.a	a. Responsivitas dari Pegawai Negeri Sipil dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	Konsep Partisipasi merupakan konsep yang relevan untuk membedah kecenderungan kepatuan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik. Program Konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik dijalankan dengan tujuan berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemaknaan partisipasi dalam pembangunan dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yang berbeda. Pertama dari perspektif pemerintah partisipasi diartikan sebagai pengorbanan dan kontribusi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil PNS). Yang kedua dari perspektif PNS dimana partisipasi dimaknai sebagai Hak untuk mendapatkan layanan kepegawaian yang lebih baik.	Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian: 1. Tingkat Partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup tinggi dalam proses perekaman data Pegawai Negeri Sipil guna pembuatan Kartu Pegawai Elektronik.
2.	Rio Jayana Putra Pegguna Layanan KPE Golongan II.c	b. Kesesuaian prosedur manajerial dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)		
3.	Fitra Handayani, S.E., M.M. Pegguna Layanan KPE Golongan III.b	c. Kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?		

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara/PNS	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Drs. Muhammad Umar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung	a. Proses Sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil (Media, cara, dan kendala). b. Proses penanganan dan pelayanan informasi KPE kepada PNS. c. Penggunaan fasilitas, sarana, prasarana dalam pelaksanaan distribusi KPE.	Konsep yang digunakan untuk membedah dimensi-dimensi dalam analisis data dengan fokus Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi adalah konsep Efisiensi dan responsifitas. Konsep efisiensi digunakan untuk membedah kesesuaian biaya operasional dan dimensi penggunaan fasilitas dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik, sedangkan konsep responsifitas akan dipakai untuk membedah dimensi proses sosialisasi dan dimensi penanganan koplain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Widodo (2001:253) efisiensi mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila kita kaitkan dengan <i>resources</i> yang digunakan dalam pelaksanaan konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik, maka akan mengemuka hal-hal seperti meminimalisasi penggunaan fasilitas dan sumber dana(Anggaran). Sumber dana (anggaran) kegiatan ini bersumber	Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian: 1. Biaya Operasional bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung dan digunakan secara efektif dan efisien. 2. Pelaksanaan Sosialisasi, termasuk proses komunikasi dilaksanakan melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
2.	SITI SUPIAH, S.H., M.H. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
3.	RINING SRI HASTUTI, M.M. Kapala Bidang Kesejahteraan, Data Dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota B.Lampung			
4.	FARIANA, S.IP., M.IP. Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
5.	Muzanni Ali, S.E. Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
6.	Drs. Rahmat Sutomo Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara			

7.	Sri Rohatinah Pengguna Layanan KPE Golongan II.a		dari APBD Kota Bandar Lampung.	
8.	Rio Jayana Putra Pengguna Layanan KPE Golongan II.c		Responsivitas menurut Widodo	
9.	Fitra Handayani, S.E., M.M. Pengguna Layanan KPE Golongan III.b		(2001:257), berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Dengan kata lain, pelaksana(Implementor) mampu dengan cepat memahami, kemudian menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan semaksimal mungkin mengupayakan untuk memenuhinya.	